

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Keyongan Kecamatan Nogosari)

Shallyna Agustine Widowati¹, Wikan Budi Utami², Hadi Samanto³

¹²³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia.

Alamat Email:

Shallyna.aw@gmail.com¹, budiutamiwikan@gmail.com², hadisamanto6110@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Widowati, S. A., Utami, W. B., & Samanto, H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Keyongan Kecamatan Nogosari). *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 2(3), 430-442.

Abstract: *This study aims to determine the effect of financial management accountability on village fund allocation, village policies dan village institutions on community welfare in Keyongan Village, Nogosari District. This type of research is quantitative. The sample in this study were 77 respondents. Source of data used in the research is primary data. Data collection techniques using questionnaire data. The data analysis technique used in this study was multiple linear regression analysis using the IBM SPSS version 25 technique. The results showed that the financial management accountability variable for village fund allocation, village policies and village institutions had a significant effect on community welfare in Keyongan Village, Nogosari District.*

Keywords: *ADD Financial Management Accountability, Village Policies, Village Institutions, Community Welfare.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 77 responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan teknik IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa, Kesejahteraan Masyarakat.*

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah, pedesaan dan perkotaan menjadi lebih seimbang dan harmonis. Maka dari itu, terdapat unsur pemerataan pembangunan yang langsung berdampak dalam kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pemerintahan desa berstatus sebagai subsistem penyelenggaraan negara pembangunan desa, dan desa bertugas serta bertanggungjawab dalam mengelola kepentingan rakyatnya. Selain itu, pemerintah juga melimpahkan kewenangan kepada pemerintah desa agar dapat mengembangkan kewenangan dan kemandirian yang lebih besar dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian integral dari perubahan paradigma pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika kesejahteraan masyarakat meningkat, maka pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil. Tanpa peningkatan kesejahteraan, keberhasilan pembangunan ekonomi akan menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kehidupan masyarakat yang tercermin pada taraf hidup masyarakat (Badrudin, 2012).

Kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dari kelangsungan hidup masyarakat dalam menyediakan pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana umum. Dengan kata lain, desa mempunyai tanggungjawab agar kebutuhan masyarakatnya dapat terpenuhi. Masyarakat akan mengapresiasi jika kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dan desa diungkapkan secara tegas dan jelas. Namun, jika hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat, maka masyarakat tidak dapat mengetahui pengelolaan alokasi dana desa, karena pengelolaan desa tidak memiliki transparansi dan akuntabilitas yang

ditampilkan kepada publik.

Akuntabilitas adalah suatu jenis kewajiban yang mensyaratkan seseorang atau badan hukum untuk menyerahkan tanggung jawab atas tindakan dan kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menuntut tanggung jawab tersebut. Tanggungjawab ini termasuk memahami setiap tindakan atau kinerja sehingga cenderung diketahui oleh masyarakat umum dan jika terjadi penyalahgunaan, sangat mungkin untuk dihukum atau dikenakan sanksi. Sementara itu, transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam mengungkapkan informasi mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian dalam menjalankan tugasnya. Transparansi dapat diartikan bahwa setiap daerah memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mempelajari proses penganggaran yang mempengaruhi kepentingan dan keinginan masyarakat, khususnya pada hal pengelolaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Putra dan Rasmini, 2019).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari pembiayaan desa yang berasal dari pembagian pendapatan pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan dalam memberikan tunjangan bagi aparatur pemerintah desa, dana pembangunan infrastruktur desa, dan bantuan pendanaan program yang mendukung kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di setiap desa, pembiayaan menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting. ADD (alokasi dana desa) adalah salah satunya.

Menurut Peraturan Pemerintah Tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005 ayat 1 butir c, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota untuk desa, paling sedikit 10% bagi setiap desa. Kurangnya kontrol dalam pengelolaan dana desa merupakan masalah yang sering terjadi pada



setiap desa.

Supaya dana desa dapat digunakan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan yang inovatif. Pengelolaan anggaran harus berorientasi pada tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi daerah (APBD) dilaksanakan sesuai rencana. Maka dari itu, pemerintah diharapkan melakukan beberapa pengawasan agar pengelolaan alokasi dana desa lebih efisien dan bermanfaat.

Tujuan pengelolaan dana desa adalah untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengutamakan proyek-proyek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini memperkuat masyarakat desa dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta memastikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dibiayai oleh desa. Pelaksanaan pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan rencana tata kota, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh perangkat desa bersama dengan pemerintah provinsi, yaitu kebijakan desa.

Kebijakan desa merupakan produk hukum, karena setiap pemerintahan desa secara hukum berhak atas kewenangan tersebut, meskipun berskala kecil, bersifat lokal dan hanya mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Sesuai undang-undang, kebijakan formal tingkat desa ditetapkan sebagai peraturan desa. Peraturan desa merupakan pengawasan dan penjabaran dari peraturan tata usaha negara yang bersifat umum dan peraturan perundang-undangan, bukan pelaksanaan peraturan yang berdiri sendiri. Otonomi, tetapi tanggung jawab otonomi desa tetap berada di bawah kendali kota/pemerintah. Akan tetapi, desa memiliki hak dan kewenangan khusus untuk ikut serta menentukan arah pembangunan nasional dan pengembangan diri desa. Dewan desa memiliki kewenangan resmi untuk membuat peraturan formal dalam bentuk

peraturan desa, yang mengembangkan kekuatan hukum positif. Namun terlepas dari formalitas tersebut, setiap desa secara tradisional memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan permasalahan desa.

Kelembagaan desa diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan desa, lembaga desa merupakan tempat organisasi dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa, tujuan pemerintahan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintahan desa adalah memberikan pelayanan dan pembangunan serta pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat. Organisasi selalu memiliki struktur organisasi yang jelas dan juga menjaga hubungan kerja, termasuk dengan organisasi lain. Kelembagaan desa biasanya terdiri dari pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga masyarakat desa, lembaga adat dan kerjasama lintas desa di desa.

Sumber keuangan alokasi dana desa adalah bagian penting dari biaya pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukan penanganan khusus dalam pengelolaan dana tersebut agar dapat mendukung program desa untuk mencapai tujuan pemerintah. Terbatasnya sumber daya yang ada dan kurangnya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat, menjadi salah satu penyebab kendala dalam penyelenggaraan pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa dalam membantu program desa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Yupita dan Juita (2020), disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.



Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Keyongan Kecamatan Nogosari)”.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Keyongan.
- b. Menganalisis pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Keyongan.

Menganalisis pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Keyongan.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2012) “Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta tanggung jawab tersebut”. Pada intinya akuntabilitas adalah mencari jawaban tentang apa yang seharusnya ditanggungjawabkan sehubungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya terjadi.

Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2014 Nomor 43, alokasi dana desa adalah dana yang dihimpun dari APBN, ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan kota, diperuntukkan bagi desa, dialokasikan untuk pengelolaan keuangan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan pembangunan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Ketentuan ADD pada PP No. Permendagri Tahun 2005 No. 72 memberikan definisi yang lebih tepat dalam Permendagri Tahun

2007 Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Pada Permendagri Tahun 2007 Nomor 37, menjelaskan apa itu alokasi dana desa, bagaimana agar dapat mengetahui berapa jumlah uang yang ada di anggaran desa, bagaimana uang dibagikan, dan apa yang harus dilaporkan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD merupakan pengelolaan dana desa di pemerintahan desa yang sangat penting dan perlu diterapkan agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan (Arifianto, 2014).

2.2. Kebijakan Desa

Kebijakan Desa merupakan produk hukum, karena setiap pemerintahan desa mempunyai kewenangan tersebut, walaupun wilayah administrasinya kecil dan bersifat lokal. Menurut Undang-Undang, kebijakan formal formal tingkat desa termasuk dalam peraturan desa. Peraturan desa merupakan bentuk pemantauan dan penyusunan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tanggung jawab otonomi desa tetap berada di bawah kendali dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota, tidak untuk menjalankan otonomi secara mandiri. Walaupun demikian desa memiliki hak dan kewenangan secara umum untuk ikut dalam menentukan arah pembangunan nasional dan khususnya dalam pembangunan desa itu sendiri.

2.3. Kelembagaan Desa

Berdasarkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, “Kelembagaan Desa” adalah lembaga pemerintahan desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa. Dalam pembangunan desa, desa memperkuat kelembagaan tersebut untuk melakukan pengelolaan desa, pembangunan desa, kepedulian masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga desa memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam kewenangan perangkat desa, yang dapat menghasilkan bentuk-bentuk hubungan kerja antar lembaga desa tersebut.

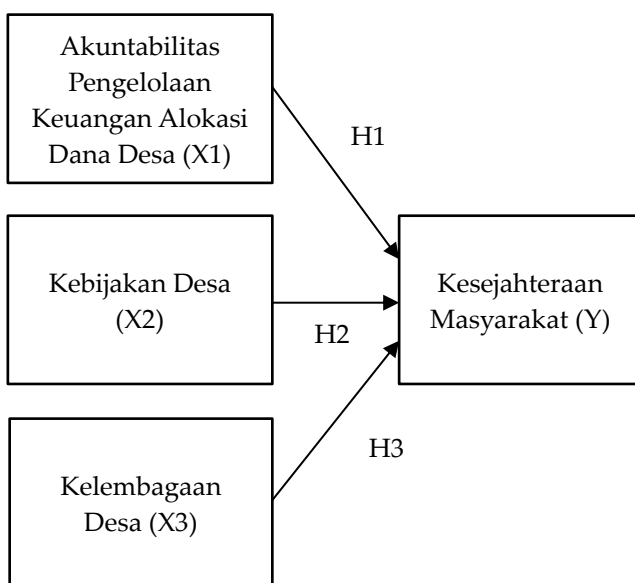


2.4. Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan UU ayat 1 pasal 11 No.11 Tahun 2009 mengenai ketentuan pokok kesejahteraan sosial, "kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan mampu berkembang sesuai dengan kemampuannya dalam melaksanakan fungsi sosialnya".

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan yang menggambarkan unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan, ketenteraman, kemakmuran, dan ketertiban kehidupan yang tertata (Soetomo, 2014).

2.5. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Modifikasi dari berbagai sumber 2023

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang ditujukan dalam penelitian ini adalah :

- H1: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
- H2: Kebijakan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
- H3: Kelembagaan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari. Dan jumlah sampel sebanyak 77 responden dengan teknik pengambilan yaitu purposive sampling atau dengan kriteria tertentu, kriteria tersebut yaitu ketua rt dan masyarakat yang berusia 30-60 tahun (setiap rt diambil 10 orang). Penelitian ini menggunakan data primer. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan kuesioner.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Masyarakat (Y) dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1), Kebijakan Desa (X2) dan Kelembagaan Desa (X3).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2018), statistik deskriptif memberikan ringkasan data yang berasal dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan informasi data sampel sebelum teknik analisis statistik diterapkan dalam menguji hipotesis.

b. Uji Validitas

Menurut Ghazali (2018), uji validitas digunakan untuk mengukur keabsahan atau valid tidaknya kuesioner. Uji validitas ini menggunakan pearson coorelation, yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dianggap valid jika tingkat signifikannya $> 0,05$.

c. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2018), uji reliabilitas merupakan alat/metode yang berguna untuk mengukur kuesioner yang menjadi indikator



dari suatu variabel. Apabila jawaban atas pertanyaan tersebut stabil atau konsisten, maka kuesioner tersebut dapat dinyatakan reliabel atau handal. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,70$.

d. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), uji normalitas bertujuan dalam menguji model regresi, variabel pengganggu atau residual apakah berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah: jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$ maka menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sebaliknya, jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* $< 0,05$ maka menunjukkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018), uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk menentukan pengujian multikolinieritas dapat menggunakan besarnya *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*. Jika nilai *Tolerance* rendah setara dengan nilai *VIF* tinggi (sebab $VIF=1/Tolerance$). Nilai cutoff untuk menentukan ada tidaknya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau *VIF* ≤ 10 .

3) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan uji *durbin watson*, dengan cara membandingkan nilai *durbin watson* hitung (d) dengan nilai *durbin watson* tabel, yaitu

batas atas (du) dan batas bawah (dL).

e. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Ghozali (2018) mengatakan bahwa metode analisis regresi linier berganda digunakan dalam metode analisis untuk menguji model pengaruh variabel dependen. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih analisis regresi juga mengukur hubungan antara variabel dependen dan independen.

2) Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Menurut Ghozali (2016), tujuan uji kelayakan model adalah untuk mengetahui keakuratan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai sebenarnya. Pengujian ini dilakukan dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 (=5%). Jika nilai sig $< 0,05$, maka model regresi yang dihasilkan layak untuk digunakan pada analisis selanjutnya.

3) Uji t

Menurut Ghozali (2018), uji t bertujuan menunjukkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen secara individual. Dengan tingkat signifikansi (α) 5% dari $df = n-K-1$ diperoleh dari t tabel kemudian nilai t tabel dibandingkan t hitung yang diperoleh. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikansi $< 0,05$ H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018), uji koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai di suatu tempat dalam kisaran nol dan satu.



4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

a. Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa nilai variabel didapat dengan menambahkan skor item pertanyaan dari kuesioner yang ada. Jumlah N (sampel) setiap variabel yaitu 77 responden, nilai minimum variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD (X1) adalah 16, Kebijakan Desa (X2) adalah 27, Kelembagaan Desa (X3) adalah 12 dan Kesejahteraan Masyarakat (Y) adalah 20. Sedangkan nilai maksimum variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD (X1) adalah 30, Kebijakan Desa (X2) adalah 45, Kelembagaan Desa (X3) adalah 20 dan Kesejahteraan Masyarakat (Y) adalah 40. Untuk nilai *mean*, variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD (X1) sebesar 23,73, variabel Kebijakan Desa (X2) sebesar 36,60, variabel Kelembagaan Desa (X3) sebesar 17,58 dan variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) sebesar 29,36. Jika nilai standar deviasi data tersebut semakin tinggi, maka jarak antara setiap titik data dan rata-rata akan semakin besar. Dalam tabel menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Desa (X2) memperoleh nilai standar deviasi tertinggi yaitu 3,714, sedangkan variabel Kelembagaan Desa (X3) memperoleh nilai standar deviasi terendah yaitu 2,086, untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD memperoleh nilai standar deviasi sebesar 3,413 dan variabel Kesejahteraan Masyarakat memperoleh nilai standar deviasi sebesar 3,426.

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	77	16	30	23,73	3,413
X2	77	27	45	36,60	3,714
X3	77	12	20	17,58	2,086
Y	77	20	35	29,36	3,426
Valid N (listwise)	77				

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

b. Uji Validitas

Berdasarkan tabel di bawah, dapat diketahui bahwa semua pernyataan dari variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, kelembagaan desa dan kesejahteraan masyarakat memiliki nilai r hitung $\geq r$ tabel 0,2242, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan valid.

Tabel 2. Uji Validitas (X1)

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X1	0,920	0,2242	Valid
X2	0,876	0,2242	Valid
X3	0,909	0,2242	Valid
X4	0,830	0,2242	Valid
X5	0,461	0,2242	Valid
X6	0,475	0,2242	Valid

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Tabel 3. Uji Validitas (X2)

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X1	0,752	0,2242	Valid
X2	0,728	0,2242	Valid
X3	0,574	0,2242	Valid
X4	0,681	0,2242	Valid
X5	0,651	0,2242	Valid
X6	0,613	0,2242	Valid
X7	0,622	0,2242	Valid
X8	0,683	0,2242	Valid
X9	0,684	0,2242	Valid

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Tabel 4. Uji Validitas (X3)

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X1	0,847	0,2242	Valid
X2	0,783	0,2242	Valid
X3	0,892	0,2242	Valid
X4	0,880	0,2242	Valid

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Tabel 5. Uji Validitas (Y)

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X1	0,802	0,2242	Valid
X2	0,788	0,2242	Valid
X3	0,857	0,2242	Valid
X4	0,710	0,2242	Valid
X5	0,835	0,2242	Valid
X6	0,863	0,2242	Valid
X7	0,849	0,2242	Valid

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

c. Uji Reliabilitas

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria	Keterangan
X1	0,862	0,70	Reliabel
X2	0,843	0,70	Reliabel
X3	0,873	0,70	Reliabel
Y	0,908	0,70	Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan pada semua variabel menghasilkan *cronbach alpha* $\geq 0,70$. Dimana untuk hasil uji reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa sebesar 0,862, Kebijakan Desa sebesar 0,843, Kelembagaan Desa sebesar 0,873 dan Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,908. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan reliabel atau dapat dipercaya dan adanya konsisten responden dalam menjawab setiap item pernyataan.

d. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 7. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,38633561
Most Extreme Differences	Absolute	0,090
	Positive	0,090
	Negative	-0,055
Test Statistic		0,90
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,198 ^c

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 7 di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,198 \geq 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Tabel 8. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD (X1)	0,458	2,184
Kebijakan Desa (X2)	0,382	2,616
Kelembagaan Desa (X3)	0,760	1,316

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan pada tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa masing - masing variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD, kebijakan desa dan kelembagaan desa menghasilkan nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* ≤ 10 . Dimana variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,458, kebijakan desa sebesar 0,382 dan kelembagaan desa sebesar 0,760. Selanjutnya hasil *VIF* akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD sebesar 2,184, kebijakan desa sebesar 2,616 dan kelembagaan desa sebesar 1,316. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat tidak menunjukkan gejala multikolinieritas.

3) Uji Autokorelasi

Tabel 9. Uji Autokorelasi

Model	R Square	Adjusted R Square	Durbin Watson
1	0,515	0,495	1,957

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 9 di atas, diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1,957, perbandingan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel sebesar 77 (n) dan jumlah variabel independen sebanyak 3 (k=3), nilai du pada tabel *Durbin Watson* adalah 1,712. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi, karena $du (1,712) < dw (1,957) < 4-du (2,288)$.



e. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 10. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	5,971	3,009
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD (X1)	-0,436	0,121
Kebijakan Desa (X2)	0,620	0,122
Kelembagaan Desa (X3)	0,629	0,154

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 10, dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = 5,791 - 0,436X_1 + 0,620X_2 + 0,629X_3 + e \dots \dots \dots (2)$$

Dapat diartikan regresi linier berganda di atas yaitu:

- Nilai konstantan sebesar 5,791 menunjukkan jika variabel independen (akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa) diasumsikan bernilai 0, maka nilai Y (kesejahteraan masyarakat) adalah sebesar 5,791.
- Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai negatif yaitu sebesar 0,436. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (X1) mengalami kenaikan sebesar 1 (satuan) maka kesejahteraan masyarakat di Desa Keyongan mengalami penurunan sebesar 0,436. Dan sebaliknya.
- Variabel kebijakan desa memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 0,620. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel kebijakan desa (X2) mengalami kenaikan sebesar 1 (satuan) maka kesejahteraan masyarakat di Desa Keyongan mengalami kenaikan sebesar 0,620. Dan sebaliknya.
- Variabel kelembagaan desa mempunyai nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu

sebesar 0,629. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel kelembagaan desa (X3) mengalami kenaikan sebesar 1 (satuan) maka kesejahteraan masyarakat di Desa Keyongan mengalami kenaikan sebesar 0,629. Dan sebaliknya.

2) Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit)

Tabel 11. Uji Kelayakan Model

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	459,029	3	153,010	25,809	0,000b
Residual	432,789	73	5,929		
Total	891,818	77			

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan pada tabel 11, diperoleh nilai F hitung sebesar 25,809 dan nilai sig sebesar 0,000 yang mana signifikan tersebut artinya < 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian ini. Hal ini juga berarti bahwa variabel independen akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD, kebijakan desa dan kelembagaan desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kesejahteraan masyarakat.

3) Uji t

Tabel 12. Uji t

Variabel	T _{tabel}	T _{hitung}	Sig
(Constant)	1,996	1,984	0,051
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1)	1,996	-3,608	0,001
Kebijakan Desa (X2)	1,996	5,096	0,000
Kelembagaan Desa (X3)	1,996	4,098	0,000

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

- Pengaruh Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan tabel 12, variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (X1) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai sig t variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa



sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,608 > t$ tabel 1,996. Sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak, H_a diterima yang berarti akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

b) Pengaruh Variabel Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan pada tabel 12, variabel kebijakan desa (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai $sig > t$ variabel kebijakan desa sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,096 > t$ tabel 1,996. Sehingga disimpulkan H_0 ditolak, H_a diterima yang berarti kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

c) Pengaruh Variabel Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan tabel 12, variabel kelembagaan desa (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai $sig > t$ variabel kelembagaan desa sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,098 > t$ tabel 1,996. Sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak, H_a diterima artinya kelembagaan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

4) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 13, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa berpengaruh 51,5% terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan besar pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini terhadap variabel kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 48,5%.

Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,7171 ^a	0,515	0,495	2,435

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat akan terus terjaga apabila pengelolaan akuntabilitas alokasi dana desa dijalankan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Novtasi & Asyik (2019) dan Nurfadilla (2022), dimana hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga membuktikan bahwa pertanggungjawaban secara terbuka atas dana yang digunakan oleh desa, membuat masyarakat mengetahui tujuan program yang dimaksud.

4.2.2. Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, ini terbukti dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat dan tetap stabil apabila kegiatan desa dilaksanakan dengan tertib.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Dura (2016) dan Supriyanto (2022), dimana hasilnya menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan desa dapat berjalan efektif apabila diterapkan sesuai dengan tujuan masyarakatnya. Kebijakan desa disusun berdasarkan keluhan masyarakat dan permasalahan dari masyarakat setempat. Dan setelah itu, pemerintah desa membuat kebijakan desa yang berfokus pada program-program pembangunan guna



meningkatkan sarana dan prasarana dan menanggulangi kemiskinan.

4.2.3. Pengaruh Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini, variabel kelembagaan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Meliati (2021) dan Assiddiq (2022), yang menunjukkan bahwa kelembagaan desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat dengan peningkatan implementasi kelembagaan desa. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat desa, keberadaan lembaga desa dapat berdampak dalam pemantauan yang lebih ketat akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

5. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Keyongan Kecamatan Nogosari :

- a. Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin aktif dan bagus implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa suatu desa dapat mempengaruhi dalam kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat Desa Keyongan Kecamatan Nogosari akan lebih percaya terhadap kemampuan pemerintah desa dalam mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pengelolaan keuangan dan akuntabilitas alokasi dana desa dilaksanakan dengan baik.
- b. Kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tercapainya kesejahteraan masyarakat dapat

difasilitasi dengan adanya kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai peraturan desa. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Keyongan Kecamatan Nogosari akan semakin tinggi dan terjaga apabila pelaksanaan kebijakan desa dalam kegiatan desa dilaksanakan dengan tertib.

- c. Kelembagaan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin baik kelembagaan desa diterapkan, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih terjaga. Keberadaan kelembagaan desa memungkinkan pemantauan yang lebih ketat terhadap akuntabilitas alokasi dana desa dalam mensejahterakan masyarakat Desa Keyongan Kecamatan Nogosari.

6. Keterbatasan Dan Saran

Ada beberapa keterbatasan selama proses penelitian ini dilakukan, antara lain: keterbatasan dalam pemahaman responden terhadap isi pernyataan pada kuesioner dan kejujuran mereka dalam proses pengisian kuesioner tersebut, dan adanya keterbatasan pada kegiatan-kegiatan dalam penelitian yang hanya dilakukan pada Desa Keyongan Kecamatan Nogosari.

Saran yang hendak disampaikan peneliti dalam penelitian ini yaitu, bagi Pemerintah Desa Keyongan Kecamatan Nogosari, menurut pendapat responden pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tetapi masih kurang adanya transparan (keterbukaan) pemerintah desa mengenai pengelolaan dana desa itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan aparatur desa dapat menerapkan prinsip transparansi dengan cara keterbukaan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seperti partisipasi masyarakat, potensi desa, dan lain-lain.



7. Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing dan seluruh dosen di ITB AAS Indonesia, serta masyarakat Desa Keyongan Kecamatan Nogosari. Tak lupa pula kepada kedua orang tua, kakak dan teman-teman yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi pada penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pati Kabupaten Pati). *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Assiddiq, M. F. (2022). pengaruh Kelembagaan Desa, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan.
- Novitasari & Asyik, N. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1-16.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugkalah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26-32.
- Emylia, L. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(6), 1-18.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Pengaruh Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25, ed.9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, R. R. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Isma, C. (2014). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan <http://repository.unib.ac.id/id/eprint/6668>
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1-22.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Meliati, M. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Pada Desa Merayuh, Kecamatan Air Besar). *Skripsi*. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.
- Nurfadilla, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bonto Tangnga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Andayani, S. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu



442 **Widowati, S. A., Utami, W. B., & Samanto, H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Keyongan Kecamatan Nogosari.**

Ekonomi (STIE) Bandung.

<https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.176>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1-27.

Sari, J. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhanperak*, 2(3), 127-140.

Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Supriyanto, R., & Hariani, S. (2022). Dampak akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana, kebijakan, dan kelembagaan desa pada kesejahteraan masyarakat. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v2i1.562>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Bagian 11 Pasal 25.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 11 Ayat 1 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 56.

